

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR
18 TAHUN 2020 TENTANG KONVERGENSI
PENCEGAHAN STUNTING
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH:
MUHAMMAD RINALDY
NPM. 208520029



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)21/10/24

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR
18 TAHUN 2020 TENTANG KONVERGENSI
PENCEGAHAN STUNTING
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

MUHAMMADRINALDY

NPM. 208520029

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD RINALDY
NPM : 208520029
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
JUDUL : Implementasi Peraturan Walikota Medan No 18 Tahun 2020
Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting (Studi Kasus Di
kecamatan Medan Belawan Kota Medan)

Disetujui Oleh,

Pembimbing



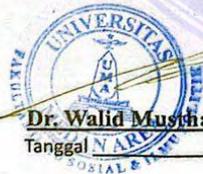
Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Tanggal _____

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Walid Muzhafa S. S.Sos, M.IP

Tanggal _____



Dr. Indra Muda, M.AP

Tanggal _____

Tanggal Lulus: 10 September 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan saksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan,



Muhammad Rinaldy
208520029

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rinaldy
NPM : 208520029
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Kota Medan
Pada tanggal: Juli 2024
Yang menyatakan



(Muhammad Rinaldy)

ABSTRAK

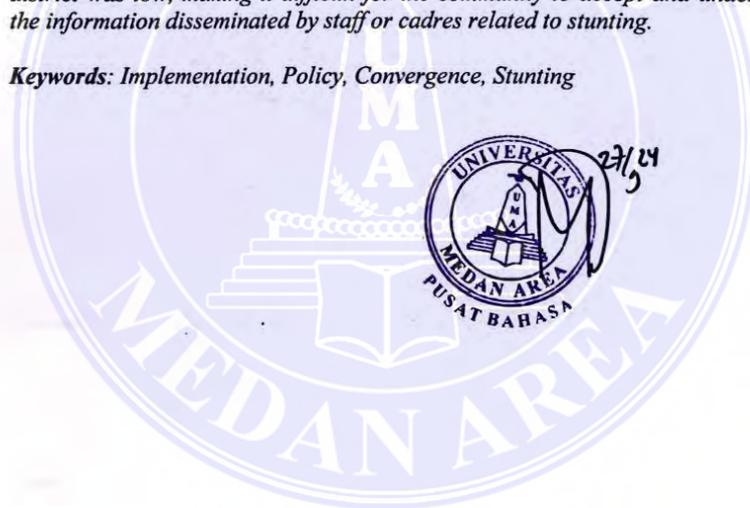
Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah banyak sekali anak-anak yang mengalami stunting atau gizi buruk di Kecamatan Medan Belawan dikarenakan faktor kemiskinan dan pengetahuan tentang stunting. Kondisi lingkungan yang tidak bersih dan pola hidup yang tidak teratur disebabkan kurangnya rasa peduli orang tua terhadap anak sehingga tumbuh kembang anak menjadi terhambat dan tidak seperti anak-anak pada umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan walikota nomor 18 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan stunting di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Edward George III yang memiliki 4 indikator yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pembangunan Pernerdayaan Masyarakat, Tenaga Pelaksana Gizi, Kader Posyandu dan Ibu dari Anak Stunting. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi peraturan walikota nomor 18 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan stunting di kecamatan medan belawan sudah berjalan optimal. Semua indikator yang ada sudah berjalan optimal. Tetapi masih terdapat beberapa kendala dari masyarakatnya yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli terhadap stunting dan pencegahannya, dan juga karena rata-rata Tingkat Pendidikan masyarakat di kecamatan medan belawan itu menengah kebawah jadi masyarakat sulit menerima dan memahami yang telah di sosialisasikan oleh pegawai atau kader terkait stunting.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Konvergensi, Stunting

ABSTRACT

The background of the problem in this thesis was that many children in the Medan Belawan District suffered from stunting or malnutrition due to poverty and a lack of knowledge about stunting. An unclean environment and an irregular lifestyle, caused by a lack of parental concern for their children, hindered the growth and development of children, making them unlike other children. This study aimed to determine the implementation of mayoral regulation number 18 of 2020 on the convergence of stunting prevention in the Medan Belawan District of Medan City. This research used the implementation theory of George Edward III, which included four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used was qualitative data analysis. The data sources in this study included the subdistrict secretary, the head of the community empowerment development section, nutrition implementing staff, posyandu cadres, and mothers of stunted children. Data were collected using observation, interviews, and documentation techniques. The results showed that the implementation of mayoral regulation number 18 of 2020 on the convergence of stunting prevention in the Medan Belawan district had run optimally. All the existing indicators had been carried out well. However, there were still some challenges from the community, such as a lack of concern about stunting and its prevention. Additionally, the average education level in the Medan Belawan district was low, making it difficult for the community to accept and understand the information disseminated by staff or cadres related to stunting.

Keywords: Implementation, Policy, Convergence, Stunting



RIWAYAT HIDUP

Penulis Skripsi ini Bernama Muhammad Rinaldy, Lahir di Kota Padangsidempuan pada tanggal 25 Mei 2002, Penulis merupakan anak Keempat dari empat bersaudara dari pasangan Sunimin dan Adelina. Pada tahun 2020, penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padangsidempuan dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan tahun yang sama juga penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT. Karena atas segala karunia-nya sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan. Dengan Judul “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)”. Terima Kasih penulis sampaikan kepada ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing dan Bapak Dr .Indra Muda, M.AP selaku Kaprodi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan saran.

Terima Kasih untuk kedua orang tua yaitu Bapak Sunimin dan Ibu Adelina yang telah mendukung, memberi fasilitas dan selalu mendoakan pada setiap Langkah saya. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik maupun masyarakat. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 22 Juni 2024

Muhammad Rinaldy
208520029

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kebijakan	8
2.1.1 Definisi Kebijakan.....	7
2.1.2 Tahap- Tahap Kebijakan	10
2.2 Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.2 Model- Model Implementasi kebijakan	14
2.3 Dimensi Implementasi Kebijakan	17
2.4 Unsur Implementasi Kebijakan	18
2.5 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan	20
2.6 Stunting	21

2.6.1 Kebijakan Stunting.....	23
2.7 Penelitian Terdahulu.....	28
2.8 Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian.....	33
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2.2 Jadwal Penelitian.....	34
3.3 Informan Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4.1 Observasi.....	36
3.4.2 Wawancara.....	35
3.4.3 Dokumentasi.....	36
3.4.4 Triangulasi Data.....	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
3.5.1 Reduksi Data.....	37
3.5.2 Penyajian Data.....	38
3.5.3 Penarikan Kesimpulan.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil.....	39
4.1.1 Gambaran Umum.....	39
4.1.2 Data Anak Terkena Stunting Di Kecamatan Medan Belawan.....	40
4.1.3 Pemerintah Kecamatan Medan Belawan.....	43

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Medan Belawan.....	46
4.1.5 Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Medan Belawan	46
4.2 Pembahasan	63
4.2.1 Implementasi Peraturan Walikota Medan No 18 Tahun 202 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan).....	63
4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Tentang Pencegahan Stunting Di Kecamatan Medan Belawan	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85
1. Pedoman Observasi	85
2. Pedoman Wawancara	85
3. Hasil Observasi	91
4. Hasil Wawancara	93
5. Dokumentasi Penelitian.....	100
6. Surat Riset Lapangan	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Paparan Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2022	3
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. Jadwal Penelitian	35
Tabel 4. Informan Penelitian.....	38
Tabel 5. Jumlah Anak Yang Terkena Stunting	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	33
Gambar 2. Kantor Camat Medan Belawan	51
Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Medan Belawan.....	63
Gambar 4. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Medan Belawan	79



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan peringkat ke lima kejadian stunting pada balita di dunia. Di Indonesia, stunting disebut kerdil, artinya ada gangguan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak pada anak. Stunting yang bercirikan tinggi yang tidak sesuai dengan usia anak, merupakan gangguan kronis masalah gizi. Anak stunting dapat terjadi dalam 1000 hari pertama kelahiran dan dipengaruhi banyak faktor, di antaranya social ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, kekurangan mikro nutrien, dan lingkungan.(Haryani, Siti, 2021) *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan stunting sebagai kondisi anak dibawah usia lima tahun yang memiliki perbandingan tinggi badan yang tidak sebanding *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan stunting sebagai kondisi anak dibawah usia lima tahun yang memiliki dengan umumnya.(Rahayu, 2020)

Permasalahan stunting tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga diberbagai negara di Indonesia, berdasarkan data Asian development Bank pada tahun 2022 presentasi *prevalence of stunting among children under 5 years of age* sebesar 31,8%.jumlah tersebut menyebabkan Indonesia berada pada urutan ke 10 diwilayah asia Tenggara.selanjutnya angka stunting Indonesia berhasil turun menjadi 21.6% Menurut WHO stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak

akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang kali yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar dan munculnya penyakit penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak.

Implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sangat membantu dalam Upaya konvergensi pencegahan stunting pertumbuhan didaerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting,terdapat tugas Pemerintah Daerah yang tertuang pada (Pasal 10 perpres 72/2021) yaitu diantaranya Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan kualitas pelaksanaan,Peningkatan kualitas pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan (Pasal 20-22 Perpres 72/2021) Susunan keanggotaan TPPS disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemantauan dan evaluasi (Pasal 24 Perpres 72/2021). Pelaporan (Pasal 25):

1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur 2 kali setahun
2. Gubernur menyampaikan laporan kepada Mendagri 2 kali setahun, dan lain-lain.

Tabel 1. Data Paparan Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH BALITA	NILAI/ %
1	Medan Belawan	<ul style="list-style-type: none"> • Belawan • Sicanang • Belawan Bahari • Belawan I 	58 Balita 44 Balita 22 Balita	6,4% 5,43% 1,94%
2	Medan Labuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pekan Labuhan 	53 Balita	4,26%
3	Medan Marelان	<ul style="list-style-type: none"> • Paya Pasir 	15 Balita	1,58%
4	Medan Deli	<ul style="list-style-type: none"> • Titi Papan 	20 Balita	1,13%

Sumber:brida.pemkomedan.go.id

Berdasarkan paparan Dinas Kesehatan Kota Medan, sebaran angka stunting di Kota Medan lebih terpusat di empat kecamatan yang ada dikawasan utara, yaitu Kecamatan Medan Belawan (Kelurahan Belawan Sicanang sebanyak 58 balita atau sebesar 6,4% Kelurahan Belawan Bahari sebanyak 44 balita atau sebesar 5,43% dan Kelurahan Belawan I sebanyak 22 balita atau 1,94%), Kecamatan Medan Labuhan (Kelurahan Pekan Labuhan sebanyak 53 balita atau sebesar 4,26% balita), Kecamatan Medan Marelان (Kelurahan Paya Pasir sebanyak 15 balita atau sebesar 1,58%), Kecamatan Medan Deli (Kelurahan Titi Papan sebanyak 20 balita atau sebesar 1,13%).Sebaran angka stunting dikecamatan lainnya tergolong lebih kecil daripada angka stunting pada keempat kecamatan tersebut.

Faktor penyebab meningkatnya kasus stunting di Kecamatan Medan Belawan yang tak lain karena asupan gizi yang kurang secara terus-menerus dan jangkauan panjang, ini terjadi karena sang ibu sering mengalami penyakit yang terus-menerus

Sehingga pola asuhan yang dilakukan sang ibu kepada balita tidak baik. Selain faktor ibu hamil yang tidak sehat dapat menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus stunting di wilayah ini. Selain faktor yang sudah disebutkan tadi terdapat beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan kasus stunting di wilayah ini adalah anemia, kekurangan vitamin D, dan kekurangan asam folat (Satriawan, 2018; WHO, 2018).

Upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam mendukung Program Penurunan angka Stunting di Indonesia maka Pemerintah Daerah Kota Medan mengeluarkan peraturan daerah No.18 tahun 2020 Tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Di Kota Medan. Didalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan bertanggung jawab untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas,sehat dan produktif yang dilakukan dengan cara memperbaiki gizi optimal secara terus menerus (Gurning et al., 2021)

Selain itu Pemerintah Kota Medan juga membuat pelaksanaan delapan aksi untuk penurunan Stunting melalui kegiatan penilaian kinerja yaitu analisis situasi lokus stunting, rencana kegiatan, rembuk stunting, penerbitan peraturan walikota, pembinaan kader Pembangunan Manusia, serta Pengukuran dan Publikasi data Stunting (Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting Di Kota Medan, 2020). Dari delapan aksi untuk penurunan stunting tersebut, setelah menganalisis situasi lokus stunting Pemerintah Kota Medan merencanakan kegiatan untuk menurunkan

angka stunting di tempat lokus stunting . yaitu Medan Belawan dan Medan Labuhan.Kegiatan yang dilakukan oleh Walikota Medan yaitu untuk memantau anak yang terpapar Stunting

Adapun kegiatan lainnya yaitu membuat “Dapur Gizi” yang dimana dapur gizi tersebut merupakan suatu kegiatan untuk memberi makanan yang Bergizi terhadap balita Stunting setiap sebulan sekali setelah pengecelan rutin perbulan.Dalam hal ini sangatlah penting dari peran pemerintah daerah dalam kegiatan untuk menurunkan angka stunting di Medan Belawan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Khadijah (2021) di Desa Mangkuhi Kabupaten Murung Raya memberikan implementasi kebijakan, dalam upaya tenaga kesehatan, dan peran bidang lain dalam penanggulangan penurunan stunting di Desa Mangkuhi sudah optimal berdasarkan kebijakan Bupati No 37 Tahun 2019 tentang penanggulangan dalam penurunan stunting, tetapi masih ada program yang belum optimal yaitu dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab dari program penurunan stunting itu sendiri yaitu faktor penghasilan masyarakat,pengetahuan masyarakat,serta adanya faktor tradisi daerah yang dianut masyarakat mangkuhi dengan pemberian awal kelahiran seperti cakuk, pisang, madu kopi dan lainnya sehingga program pemberian ASI Eksklusif dan informasi seputar gizi masih belum berjalan dengan baik (Khadijah, 2021).

Penelitian Widayati & Sulistiyarini (2022) di Blora menunjukkan, pelaksanaan antisipasi yang dilakukan belum optimal, karena masih terdapat kendala-kendala khusus yang terjadi dalam pelaksanaan di masing-masing OPD. Telah terdapat

kebijaksanaan pengurangan stunting dalam peraturan bupati Nomor 13 Tahun 2022 . tentang percepatan penurunan stunting dan telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat program yang belum dilaksanakan secara ideal oleh masyarakat mengingat adanya stunting, misalnya pendekatan kepada masyarakat dalam penurunan stunting (Widayati & Sulistiyarini, 2022). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas peran pemerintah daerah dalam penurunan stunting, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING (Studi kasus di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Bagaimana implementasi peraturan walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Belawan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peraturan kota Medan tentang Stunting di Kecamatan Medan Belawan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi peraturan kota Medan tentang Stunting di Kecamatan Medan Belawan.
2. Untuk menganalisa faktor penghambat dalam implementasi peraturan kota Medan tentang Stunting di Kecamatan Medan Belawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang sangat mendukung terdiri dari:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai salah satu sumber referensi terbaru untuk menambah pengetahuan dan panduan apabila ada yang melakukan kajian selanjutnya
2. Memperbanyak teori tentang stunting

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Medan Area, harapan penulis hasil dari kajian ini sebagai literatur agar bisa menyumbangkan pengetahuan tentang stunting.
2. Bagi Kecamatan Medan Belawan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman pemerintah dalam mengatasi dan menjalankan implementasi pemerintah dalam penurunan stunting di Kecamatan Medan Belawan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman Tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu Tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan, Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu:

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik.

2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai
3. kebijakan lainnya dalam Masyarakat
4. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan pemerintah
5. Kebijakan dapat bersifat positif dan negatif
6. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki wewenangan Masyarakat mematuhi.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu Tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi Sebagian besar warga Masyarakat. Muhlis Madani (2011) menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu dibuat juga oleh organisasi pemerintahan yang ada. Menurut Said Zainal Abidin (2004 : 23) kebijakan public adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas, Oleh karena itu kebijakan public memiliki fungsi sebagai pedoman umum kebijakan. Serta memiliki keputusan khusus di bawahnya.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000 : 17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Amara Raksataya menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 elemen yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai Langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Menurut Elau dan Prewitt (Edi Suharto, 2012: 7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (Edi Suharto, 2012: 7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai prinsip-prinsip yang mengatur Tindakan yang diserahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada Tindakan.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami Masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan Masyarakat yang belum terpenuhi.

2. Analisis Masalah dan Kebutuhan

Tahap berikutnya adalah mengolah, melilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan Masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransfomasikan ke dalam laporan yang terorganisasi.

3. Penginformasian Rencana Kebijakan

Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem Masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada Lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

4. Perumusan Tujuan Kebijakan

Setelah mendapatkan berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis Kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan

5. Pemilihan Model Kebijakan

Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan

6. Penentuan indikator Sosial

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standart bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.

7. Membangun Dukungan dan Legislatif Publik

Tugas tahap ini adalah menginformasikan Kembali rencana kebijakan yang telah

disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok Masyarakat agar tercapai consensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan ditetapkan.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Adapun Pengertian implementasi kebijakan menurut Wahab (2002: 42) adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum Tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan ditetapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk, (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan Tindakan yang dilakukan oleh (orga

nisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Menurut Waluyo (2007: 50-57) implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan public yang pada umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Istilah implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (Wahab, 2008).

Sedangkan Wibawa (1994) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertuang dalam suatu undang-undang. Namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan sstruktur” proses implementasi tersebut (Wibawa, 1994).

Secara singkat Winarto (2008) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu Upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Sementara itu Mufiz (1999), menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktifitas-aktifas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya menurut Huntington (Mulyadi, 2015: 24) perbedaan yang paling penting antara sesuatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politburo, cabinet atau presiden negara itu. Menurut Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014: 56) menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana dilapangan dan aktor individu selaku kelompok target”.

2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan

Model-model implementasi kebijakan menurut Gortner Harold, 2001 dalam (Yamin MN, 2016) antara lain:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan public, implementor, dan kinerja kebijakan public. Beberapa variable yang dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan public,

implementor, dan kinerja kebijakan public. Beberapa variable yang dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan public adalah variabel: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan kecenderungan (disposition) pelaksana/omplementor.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini disebut model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) Model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Variabel tersebut adalah variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen

c. Model Hoogwood dan Gunn

Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini secara tidak tegas menunjukkan nama yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional

d. Model Goggin, Bowman, dan Lester

Model ini bertujuan mengembangkan model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independent, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan

e. Model Grindle

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan

dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut

f. Model Elmore, dkk

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan public yang mendorong Masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

a. Model George C. Edward III

Model ini menegaskan bahwa masalah utama Administrasi public adalah *lack of attention to implementation* (kurangnya perhatian dari implementasi). Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymaker will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, pembuatan kebijakan tidak akan berjalan lancar). Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu: komunikasi,resources,disposition, dan struktur birokrasi

b. Model Nakamura dan Smallwood

Model ini menautkan pembentukan kebijakan dalam implementasi kebijakan secara praktikal. Konsep ini menjadi magnet yang sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan ilmuwan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu berkontribusikan nilai bagi kehidupan Bersama. Konsekuensinya adalah pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para professor kebijakan public, namun juga para praktisnya birokrasi dan Lembaga Administrasi Publik lainnya.

c. Model Jaringan

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah aktor besar yang berada dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independent, interaksi diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya.

Matland (Hamdi, 2014: 98) menambahkan, pikiran pokok dari model *top-down* kedalam empat hal berikut:

- a. Menjadikan tujuan kebijakan bersifat jelas dan konsisten
- b. Meminimalkan jumlah aktor
- c. Membatasi tentang perubahan yang diperlukan
- d. Menempatkan tanggung jawab implementasi pada instansi yang bersimpat dengan tujuan kebijakan

2.3 Dimensi Implementasi Kebijakan

Menurut Dunn and William N. (1981), dimensi implementasi kebijakan public berkaitan dengan rangkaian proses kebijakan public, yang secara teoritis terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

- a. Tahap-tahap kebijakan public yaitu penerapan agenda kebijakan (agenda setting) formulasi kebijakan (*policy implementation*), adopsi kebijakan, implementasi kebijakan (*policy implementation*) hingga penilaian kebijakan (*policy assessment*)

- b. Analisis kebijakan yaitu pemilahan-pemilahan identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik untuk di implementasikan.
- c. Implementasi kebijakan yaitu yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi profram, dalam hal ini bagaimana
- d. administrator mengatur cara untuk mengorganisir dan mengintrepretasikan hingga menerapkan kebijakan yang telah melalui seleksi
- e. Monitoring dan evaluasi kebijakan yaitu dimaksud agar suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan dilakukan monitoring dan evaluasi, untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dijaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan program, mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar kebijakan atau politik

2.4 Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab, (1990: 45), implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya, Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu Masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses

penerapan tersebut.

Menurut Tachjan (2006: 26). Unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur pelaksanaan

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006: 28), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

1. Adanya program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan public tidak mempunyai arti penting adanya Tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam suatu kesatuan

2. Target group atau kelompok sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam Masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Terlepas dari seberapa banyak unsur-unsur yang ada atau yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka pastinya sangat banyak jumlah dan jenisnya. Unsur itu tidak hanya berada di sisi internal organisasi yang menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga berada di sisi eksternal kebijakan, Dikedua sisi tersebut ada banyak unsur yang masing-masing memiliki sub unsur

yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa masing-masing unsur, baik yang ada disisi internal ataupun sisi eksternal itu saling berinteraksi yang ujungnya memberi pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan..

2.5 Faktor -Faktor Implementasi Kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan (implementasi), kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam buku Subarsono (2006: 90), implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi
- b. Sumberdaya (*resource*) meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif, Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial
- c. Sikap birokrasi dan pelaksanaan (disposisi) adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980: 98) mengatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut kita dapat mempertimbangkan/memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- d. Faktor Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III 1980: 125). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-type, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operating Procedure (SOP) dan fragmentasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2007: 158), terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.
4. Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

6. Kecenderungan para pelaksana.

2.6 Stunting

Stunting merupakan dimana badan anak lebih pendek dibanding anak lain seusianya, hal ini juga kenal dengan kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diperoleh bayi/janin selama masa 1000 hari pertama kehidupan, dimana hal ini dapat menyebabkan kematian janin. Efek jangka pendeknya dapat menyebabkan perkembangan otak, pertumbuhan masa tubuh dan komposisi badan terhambat, serta gangguan metabolisme glukosa, lipid, protein dan hormone. Efek jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kekebalan tubuh, kapasitas kerja, dan terjadinya penyakit, seperti jantung dan pembuluh darah, diabetes, kanker, dan disabilitas lansia (James dalam Jalal 2007). Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung dari kehamilan sampai usia 24 bulan (Hoffman et al, 2000; Bloem et al, 2013)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibanding dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja Pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh Pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan perkembangan bangsa. Sementara stunting dapat berdampak pada penurunan IQ anak Indonesia sebanyak 10-15 poin, prestasi anak yang buruk lebih lanjut anak diprediksi meraih

pendapatan 20% lebih rendah diusia kerja, sehingga meperparah kemiskinan dan mengancam kelanjutan hidup generasi mendatang (Jalal 2007; Cahyono,Manongga dan Picauly 2016)

Faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai Kesehatan dan gizi sebelum dan sesudah masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatka air susu ibu (ASI)
2. secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping susu ibu (MP-ASI)
3. Masih yerbatasnya layanan Kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan Kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi yang dikumpulkan dari publikasi kemenkes dan bank dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 54% di 2013 dan anak belum mendapatkan akses yang memadai ke layanan imunisasi.
4. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Penyebabnya karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.
5. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi, Data yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di indoneisa masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses air minum bersih.

2.6.1 Kebijakan Stunting

Kebijakan pencegahan stunting di Indonesia, erat kaitannya dengan kebijakan perbaikan gizi. Karena stunting menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan dampak dari kekurangan gizi kronis pada balita sehingga menjadi lebih pendek pada usianya. Hal ini terjadi dimulai pada awal pembentukan janin sampai anak berusia dua tahun, (Doddy, 2019: 20)

Kebijakan pencegahan stunting di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu seperti UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat dalam pasal 141, 142, dan 143. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada Upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan Kesehatan, meningkatkan ketercapaian sara dan mutu pelayanan gizi, peningkatan system kewaspadaan pangan dan gizi serta Upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan

Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) juga mengatur tentang Upaya dalam pencegahan stunting merupakan Upaya pencegahan secara Bersama. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Upaya percepatan perbaikan gizi dilakukan secara Bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi. Dari undang-undang dan peraturan presiden yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa adanya penekanan dalam Upaya pelaksanaan pencegahan stunting di Indonesia, namun dalam penerapannya masih belum optimal dilaknakan. Sehingga berdampak

pada angka prevalensi stunting di Indonesia fluktuatif dari tahun ke tahunnya.

Pemerintah telah meluncurkan Rencana kegiatan masyarakat untuk menurunkan angka stunting melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang mempunyai tata cara (RAN-PASTI) untuk mencapai tujuan penurunan angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang mempercepat penurunan stunting. Tantangan terbesar dalam rencana kegiatan ini adalah hal-hal yang langsung dikaitkan dengan penyebab terjadinya kekurangan gizi. Ibu hamil dan anak dibawah dua tahun (Baduta) merupakan kelompok yang sangat penting dalam menghadapi stunting, sesuai dengan pola kehidupan 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) (Joyce et al., 2014)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021. Antara lain mengenai :

1. Strategi nasional percepatan penurunan stunting
2. Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting
3. Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
5. Pendanaan

Tahun 2018, kebijakan penanggulangan stunting dilakukan melalui memprioritaskan 160 kabupaten/kota, dengan masing-masing 10 desa untuk penanganan stunting, dimana program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap I dilaksanakan pada tahun 2018, dengan jumlah kabupaten/kota prioritas 100 kabupaten/kota terdiri dari 10 desa. Sehingga total desa bertambah 1000 desa. Tahap II dilaksanakan tahun 2019, terdiri dari 60 kabupaten/kota prioritas dengan total

jumlah desa 600. Setiap kementerian terkait diharuskan mengalokasikan program dan kegiatannya di 100 desa pada 10 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan stunting. Pihak terkait diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, dan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Kementerian Kesehatan, dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Berbagai kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka penanggulangan stunting. Adapun kebijakan/regulasi tersebut diantaranya yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019
3. Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi 2011-2015
4. Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah (PP) No 33/2012 tentang Air Susu Eksklusif
6. Peraturan Presiden (Perpres) No 42/2013 tentang Gerakan Nasional Perbaiki Gizi
7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif Pada Bayi di Indonesia
8. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan /atau Memerah Air Susu Ibu
9. Permenkes No. 3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
10. Permenkes No. 23/2014 tentang Upaya Perbaiki Gizi
11. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka

Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK),2013

12. Hari Pertama kehidupan (Gerakan 1000 HPK)

Dengan kondisi permasalahan stunting yang semakin memprihatinkan bagi masa depan Indonesia, maka Presiden Jokowi pada 2021 mengeluarkan Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting. Adanya Peraturan Presiden tersebut, diharapkan seluruh komponen secara konvergen dan terintegrasi dapat melaksanakan percepatan penurunan stunting pada angka 14% pada tahun 2024 mendatang sesuai target pemerintah. Dalam rangka percepatan penurunan stunting tersebut, agar pelaksanaannya dapat bermanfaat dan tepat sasaran keseluruh pelosok Indonesia maka pemerintah melalui kementerian dan Lembaga yang Menyusun kebijakan-kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan menanggulangi kondisi stunting di Indonesia.

Pemerintah telah menerapkan beberapa paket kebijakan dalam mengatasi dan menurunkan kasus stunting, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya berupa penyediaan bahan pangan lokal untuk asupan makanan yang sehat dan bergizi, intervensi kepada remaja atau calon pengantin dengan pengecekan dan konsultasi Kesehatan sebelum menikah, pemeriksaan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita dan balita terkait kondisi Kesehatan ibu, anak beserta tumbuh kembang anak, membangun forum sebagai wadah edukasi dan sosialisasi tentang stunting untuk remaja (calon pengantin) dan ibu hamil, kegiatan fasilitasi Pembangunan sanitasi bagi warga negaranya, serta banyak lagi kebijakan lainnya

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam Tinjauan Psutaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun/ Sumber	Judul	Uraian	Hasil	Perbedaan
1	SRI HAJIJAH PURBA/ 2019/ Skripsi	ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI DESA SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT	<p>Metode: mixed method research</p> <p>Teknik Pengumpulan data: wawancara dan observasi, <i>non random sampling</i></p> <p>Teknik Analisis Data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi</p> <p>Lokus:DESA SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Secanggang sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting, tetapi masih ada program dari kebijakan tersebut yang belum terlaksana secara optimal, seperti pemberian ASI Eksklusif dan pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Adapun saran dalam penelitian ini adalah pentingnya peran aktif pemerintah dan tenaga kesehatan dalam penurunan stunting pada balita dan perlunya sosialisasi kebijakan penurunan stunting di masyarakat.Selain itu, diharapkan masyarakat untuk menerapkan pola makan gizi seimbang dan mendapatkan pelayanan dan pendidikan yang</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam penelitian Sri Hajijah Purba Metode penelitian yg digunakan adalah metode mixed method research,,kebijakan yang digunakan adalah kebijakan bupati langkat nomor 10 tahun 2018, Lokasi penelitian di desa secanggang kabupaten langkat,Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan</p>

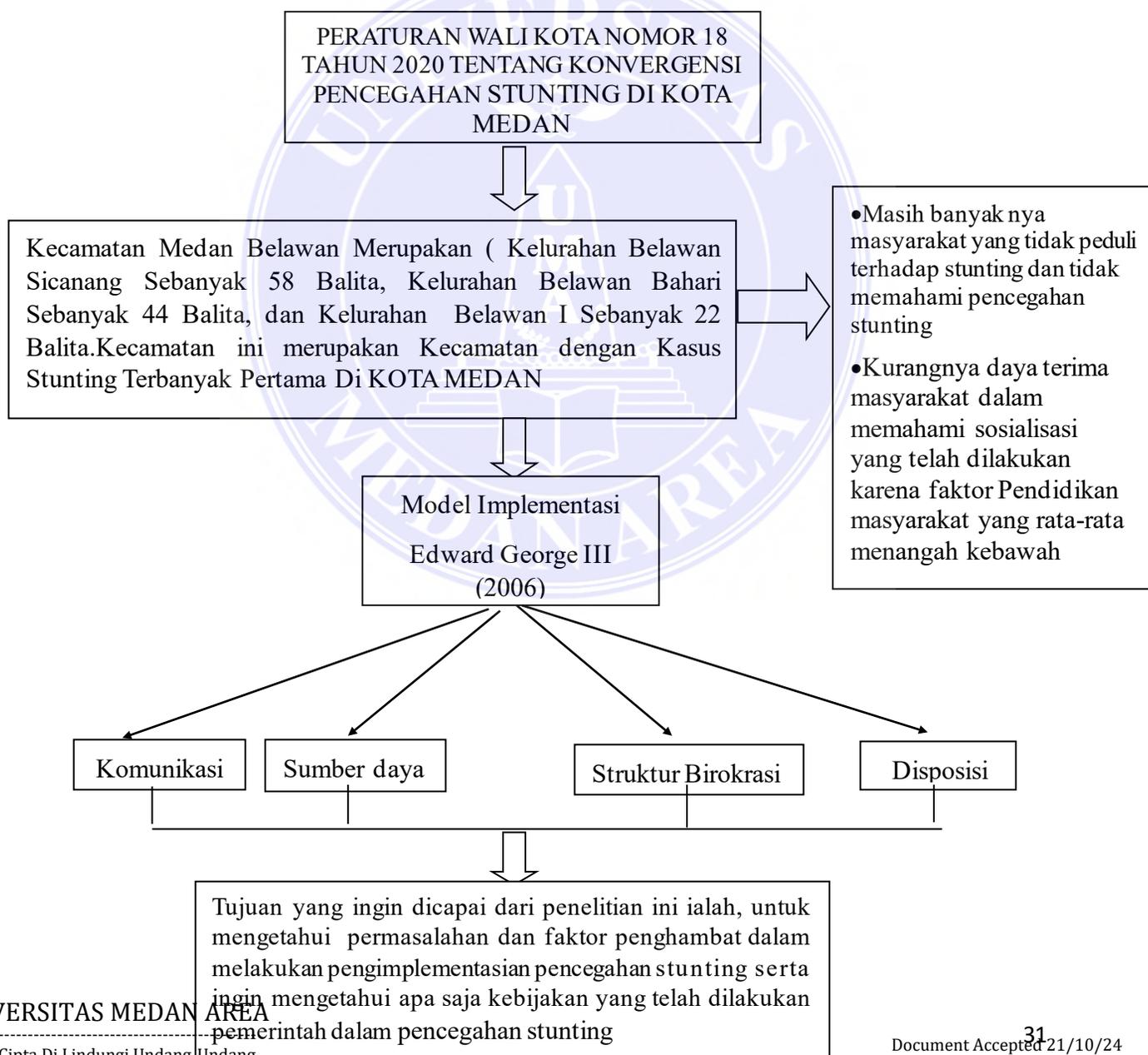
No	Nama/ Tahun/ Sumber	Judul	Uraian	Hasil	Perbedaan
				layak untuk meningkatkan kesejahteraanya.	
2	Christina Nur Widayati dan Sulistiyarini/ 2022/ Journal of TSCS1Kep	ANALISA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN BLORA	<p>Metode: Kualitatif</p> <p>Teknik Pengumpulan data: wawancara secara mendalam dan bukti dokumentasi.</p> <p>Teknik Analisis Data: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.</p> <p>Lokus: KABUPATEN BLORA</p>	<p>dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pencegahan stunting terintegrasi sudah dilakukan namun masih belum maksimal , Sudah terdapat Kebijakan Pencegahan stunting Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada program kebijakan tersebut yang belum terlaksana secara optimal. Selain itu sudah terbentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) di seluruh Tingkat kecamatan, bahkan sudah sampai Desa dan Kelurahan.</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian Christina Nur Widayati dan Sulistiyarini lokasi penelitiannya berada di Kabupaten Blora, Peraturan yang digunakan Peraturan bupati no 13 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting, di kabupaten blora ini sudah terbentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS)</p>
3	Dorsinta Siallagan, Desi Rusiana, Ela Susilawati/2021/ Indonesian Journal of Midwifery (IJM)	Determinan Stunting Pada Balita Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2020	<p>Metode: kuantitatif</p> <p>Teknik Pengumpulan data: Kuisisioner</p> <p>Teknik Analisis Data: univariate, Chi-square, regresi logistic berganda</p> <p>Lokus: di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tangerang</p>	<p>Hasil penelitian univariate: kejadian stunting sangat pendek sebesar 28,2%. Bivariate: terdapat hubungan yang signifikan antara usia (p=0,000), pengetahuan (p=0,000), riwayat ANC (p=0,023), BBLR (p=0,005) ASI eksklusif (p=0,001), pola asuh makan (p=0,005) dan riwayat penyakit (p=0,005) dengan</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam penelitian Dorsinta Siallagan,Desi Rusiana, Ela Susilawati Lokasi Penelitiannya di puskesmas wilayah kabupaten Tangerang,hasil penelitian faktor paling dominan terhadap kejadian stunting adalah umur resiko tinggi saat hamil dengan QR 9,333</p>

No	Nama/ Tahun/ Sumber	Judul	Uraian	Hasil	Perbedaan
				<p>kejadian stunting pada balita di pusat kesehatan masyarakat wilayah kabupaten Tangerang.</p> <p>Multivariate: faktor paling dominan terhadap kejadian stunting adalah umur resiko tinggi saat hamil dengan OR 9,333. Saran: dilakukan sosialisasi 1000 HPK, penyuluhan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), usia resiko tinggi pada saat hamil. Sehingga perempuan tidak hamil dalam kondisi 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran dan terlalu banyak anak).</p>	
4	Ni Ketut Aryastami, dan Igan Tarigan/ 2017/ Buletin Penelitian Kesehatan	Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia	Metode: review literatur	Prevalensi stunting di Indonesia memiliki angka cukup stagna n dari tahun 2007 hingga 2013. WHO menetapkan batasan masalah gizi tidak lebih dari 20%, sehingga dengan demikian Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki masalah kesehatan masyarakat. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kebijakan dan kesenjangan yang dapat dipecahkan melalui opsi kebijakan melalui analisis dokumen legal dan literatur	Perbedaannya adalah dalam penelitian Ni Ketut Aryastami dan Igan Tarigan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode review literatur Lokus penelitiannya adalah kajian kebijakan penanggulangan stunting masalah gizi stunting di Indonesia, Hasil penelitian ini ini adalah apa saja kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk pencegahan

No	Nama/ Tahun/ Sumber	Judul	Uraian	Hasil	Perbedaan
				<p>lainnya serta program yang telah dikembangkan. Kemudian dilakukan forum diskusi dengan melibatkan pakar dalam menyusun hasil sebagai opsi kebijakan. Penurunan angka stunting hanya mencapai 4% antara tahun 1992 hingga 2013. Perpres no. 42/2013 telah menetapkan Gerakan Nasional Seribu Hari Pertama Kehidupan dalam upaya meningkatkan status gizi balita yang diikuti oleh pengembangan program termasuk anggarannya. Stunting memiliki risiko panjang yakni PTM pada usia dewasa, walaupun masih dapat dikoreksi pada usia dini. Upaya penurunan masalah gizi harus ditangani secara lintas sektoral di semua lini. Ibu dan calon pengantin harus dibekali dengan pengetahuan cukup tentang gizi dan kehamilan, ASI Eksklusif pada ibu bersalin yang sehat. Selanjutnya MPASI harus dipahami oleh para ibu dan tenaga kesehatan secara optimal.</p>	<p>stunting di Indonesia dan memberi edukasi dan informasi kepada ibu dan para calon pengantin terkait pengetahuan cukup tentang gizi dan kehamilan</p>

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir ialah Proses melakukan pengaturan dalam melakukan penyajian pertanyaan dalam penelitian dan mendorong penyelidikan atas permasalahan yang menyajikan permasalahan dan konteks penyebab peneliti melakukan studi tersebut



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2019 : 16-17) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kualitatif/ainduktif, dengan menguji hipotesis yang telah ditetapkan, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.

3.2 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Camat Medan Belawan Kota Medan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dikarenakan Kecamatan Medan Belawan merupakan Kecamatan dengan kaus stunting terbanyak dan menjadi lokus percepatan dan penurunan stunting di Kota Medan

3.2.2 Jadwal Penelitian

Tabel 3. Waktu Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agus 2024	Sep 2024
1.	Pengajuan Judul	■											
2.	Penyusunan Proposal	■	■										
3.	Seminar Proposal			■									
4.	Perbaikan Proposal			■									
5.	Penelitian			■	■								
6.	Penyusunan Skripsi			■	■	■	■	■	■	■			
7.	Seminar Hasil										■	■	■
8.	Perbaikan Skripsi										■	■	■
9.	Sidang meja Hijau												■

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti, menurut Sugiyono, (2016: 54) Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi atau data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Ada tiga informan penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah seseorang yang paham dan mengerti serta memiliki data perihal informasi secara keseluruhan bagaimana alur permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci adalah Bapak Yose Ferry S.Sos selaku Sekretaris Camat Medan Belawan.

2. Informan Utama

Informan utama adalah informan yang secara langsung terlibat di dalam interaksi sosial permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi informan utama adalah Ibu Irma Suri Efanti, A.Md selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Sri Andriani selaku Tenaga Pelaksana Gizi, dan Juli Harnani selaku Kader Posyandu.

3. Informan Tambahan

Informan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi atau kegiatan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan adalah Ibu Siti Fauziah selaku Ibu dari Anak yang terkena Stunting.

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Sekretaris Camat Medan Belawan	Informan Kunci
2	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Informan Utama
3	Tenaga Pelaksana Gizi	Informan Utama
4	Kader Posyandu	Informan Utama
5	Ibu dari anak penderita Stunting	Informan Tambahan

Sumber :Peneliti, 2024

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. Observasi bisa dilakukan dengan objek yang nyata dan bisa diamati secara langsung

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (interview) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

3.4.4 Triangulasi Data

Triangulasi data adalah salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik ini juga diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Menurut Sugiono Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai pengolahan data dengan cara menganalisa data yang telah diperoleh Ketika penelitian memulai wawancara hingga pengumpulan data lain selesai dalam waktu tertentu. Peneliti sudah melakukan Analisa terhadap jawaban yang telah diperoleh dari informan pada saat wawancara berlangsung. Sehingga apabila data yang diperoleh dari informan tidak cukup maka peneliti akan melanjutkan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini sehingga data yang diperoleh bersifat kredibel.

Miles dan Hubberman (1994) dalam Sugiono (2019) mengatakan ada tiga komponen analisis data kualitatif yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu, Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus Ketika masih berada dilapangan hingga kesimpulan yang didapat lebih rinci.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan yang telah di paparkan, maka dapat di simpulkan :

1. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Sudah Optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa aspek, yaitu pertama Komunikasi dalam mensosialisasikan Sudah maksimal tetapi Kembali lagi ke masyarakatnya Karena Kecamatan Medan Belawan adalah daerah pesisir jadi rata-rata Tingkat Pendidikan masyarakatnya yang menengah kebawah yang mengakibatkan daya terima masyarakat yang kurang. Kemudian yang Kedua adalah aspek sumber daya, sumber daya staf yang ada di kecamatan Medan Belawan sudah memiliki kemampuan mengenai stunting dan penanganannya, sumber daya sarana dan prasarana juga sudah memadai. Selanjut nya sikap pelaksana dalam penyampaian informasi kepada masyarakat sudah maksimal, kemudian dalam struktur birokrasi pada kecamatan medan belawan berdasarkan hasil dilapangan dilapangan maka penulis dapat mendeksripsikan bahwa SOP dalam pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik
2. Terdapat Hambatan dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 Tentang konvergensi pencegahan stunting di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan yaitu, Yang pertama kurangnya Tingkat Pendidikan masyarakat yang

mengakibatkan daya terima masyarakat yang kurang dalam menerima informasi dalam sosialisasi, Yang kedua kurangnya kepedulian masyarakat terkait pencegahan stunting sudah diingatkan berkali-kali atau di beritahu masyarakat di Kecamatan Medan Belawan tidak mendengarkannya seperti ibu jangan punya anak dulu tetapi tetap punya anak, sudah disuruh ikut Kb implant gratis masyarakatnya tidak mau banyak alasannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Konvergensi pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi Kecamatan Medan Belawan

Bagi Kecamatan Medan Belawan agar dapat melakukan sosialisasi secara ekstra dan juga melakukan pedampingan terhadap masyarakat agar semua masyarakat dapat memahami apa saja yang perlu diketahui dalam pencegahan stunting

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih peduli terhadap masalah stunting agar tidak bertambahnya anak balita yang terkena stunting dan juga mengikuti apa saja yang dianjurkan oleh staf pegawai agar pencegahan stunting berjalan optima

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AG, S. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. (2008). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, D. (2014). Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Praktik (1st ed). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayuningtyas, D. (2018). Analisis Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Aplikasi (1st ed). Depok: Rajawali Pers.
- Dunn, William. N. 1981. Public Policy Analysis And Introduction. USA: Prentice Hall.
- Huberman, B. m. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru. Jakarta : UIP.
- J, M. L.(2013), Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Darwin, 1999, Analisis Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada Press:Jogjakarta.
- Mulyadi, (2015), Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University
- RI ,K. (2018). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian.
- Riant, N. (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Riant, N. (2015). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riskesdas. (2018). Hasil Utama Kesehatan Riskesdas. Kementerian Kesehatan
- S, R. R. (2018). Stop Stunting Dengan Konseling Gizi. Jakarta: Penebar Plus
- Sandjaja.(2011). Panduan Penelitian. Jakarta : Prestasi Pustaka Karya
- Sugiyono (2019), Metodologi Penelitian Kualitaitf dan Kuantitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA

Jurnal

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Edriani, M., & Hasibuan, R. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI UPT PUSKESMAS TERJUN KOTA MEDAN. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(3), 4162-4172.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Nisa, L. S. (2018). Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173-179.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.
- Sutarto, S. T. T., Mayasari, D., & Indriyani, R. (2018). Stunting, Faktor ResikodanPencegahannya. *Agromedicine Unila*, 5(1), 540-545.

Website

- Bobby-Nasution-Tahun-2022-penanganan-stunting-di-medan-lebih-terarah.html
<https://pemkomedan.go.id/artikel-22417> (Diakses pada Tanggal 15 September 2023)
- edyrahmayadi-Tahun-2022-targetkan-pravalensi-stunting-di-sumut-turun-hingga-39pertahun<https://sumutrov.go.id/artikel/artikel/optimis-capai-14-di-tahun-2024> (diakses pada tanggal 15 september 2023)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga

Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Kovergensi Pencegahan Stunting Di Kota Medan



LAMPIRAN

1. Identitas Observasi
 - a. Lembaga yang diamati :
 - b. Lokasi :
 - c. Hari/ Tanggal :

2. Aspek- aspek yang diamati
 - a. Meninjau langsung lokasi penelitian, serta keadaan sekitar lokasi lingkungan kantor Camat Medan Belawan
 - b. Mengamati kegiatan yang dilakukan pegawai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat

3. Lembar Observasi

No	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Profil Kantor Kepala Desa			
2.	Visi misi Kepala Desa			
3.	Struktur Pemerintahan			
4.	Standar Operasional Prosedur/ Maklumat Pelayanan			
5.	Sikap Pegawai			
6.	Sarana Dan Prasarana			
7.	Sikap/ respon			

2. Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN

Identitas Informan I (Informan Kunci)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :

Komunikasi

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat terkait pencegahan stunting?
2. Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak internal dengan pelaksana terkait sosialisasi tersebut?
3. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
4. Kapan sosialisasi ini mulai dilakukan ? untuk waktu pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan berapa bulan sekali ?
5. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi tersebut ?
6. Apakah sosialisasi tersebut sudah berjalan optimal ?

Sumber Daya

1. Apakah Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang stunting dan penanganannya ?
2. Apakah sarana dan prasarannya serta fasilitas sudah memadai dalam menunjang kegiatan implementasi peraturan walikota tersebut ?
3. Bagaimana untuk anggaran dalam implementasi kegiatan peraturan walikota medan no 18 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan stunting ?

Disposisi

1. Apakah pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan tsb ?
2. Bagaimana sikap pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?

Struktur Birokrasi

1. Apakah kantor camat memiliki SOP yang jelas terkait kebijakan mengenai stunting dan pencegahannya ?

Identitas Informan II (Informan Utama)

1. Nama :

2. Jenis Kelamin :

3. Pekerjaan :

Komunikasi

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat terkait pencegahan stunting ?
2. Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak internal dengan pelaksana terkait sosialisasi tersebut?
3. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
4. Kapan sosialisasi ini mulai dilakukan ? untuk waktu pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan berapa bulan sekali ?
5. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi tersebut ?
6. Apakah sosialisasi tersebut sudah berjalan optimal ?

Sumber Daya

1. Apakah Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang stunting dan penanganannya ?
2. Apakah sarana dan prasarannya serta fasilitas sudah memadai dalam menunjang kegiatan implementasi peraturan walikota tersebut ?
3. Bagaimana untuk anggaran dalam implementasi kegiatan peraturan walikota medan no 18 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan stunting ?

Disposisi

1. Apakah pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan tsb ?
2. Bagaimana sikap pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?

Struktur Birokrasi

1. Apakah kantor camat memiliki SOP yang jelas terkait kebijakan mengenai stunting dan pencegahannya ?

Identitas Informan III (Informan Utama)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :

Komunikasi

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat terkait pencegahan stunting ?
2. Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak internal dengan pelaksana terkait sosialisasi tersebut?
3. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
4. Kapan sosialisasi ini mulai dilakukan ? untuk waktu pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan berapa bulan sekali ?
5. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi tersebut ?
6. Apakah sosialisasi tersebut sudah berjalan optimal ?

Sumber Daya

1. Apakah Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang stunting dan penanganannya ?
2. Apakah sarana dan prasarannya serta fasilitas sudah memadai dalam menunjang kegiatan implementasi peraturan walikota tersebut ?
3. Bagaimana untuk anggaran dalam implementasi kegiatan peraturan walikota medan no 18 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan stunting ?

Disposisi

1. Apakah pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan tsb ?
2. Bagaimana sikap pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?

Struktur Birokrasi

1. Apakah Puskesmas Medan Belwan memiliki SOP yang jelas terkait kebijakan mengenai stunting dan pencegahannya ?

Identitas Informan IV (Informan Utama)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :

Kominikasi

1. Apakah ibu mendapatkan penyuluhan tentang pencegahan stunting dari puskesmas?
2. Apakah dengan penyuluhan tentang pencegahan stunting dapat membuat masyarakat yang memiliki balita stunting memahami pencegahan stunting, jika iya bagaimana caranya?
3. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
4. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi tersebut ?

Sumber Daya

1. Apakah kader posyandu mendapatkan sarana dan prasarana dari puskesmas dan kelurahan dalam pelaksanaan posyandu?
2. Apakah pelaksanaan posyandu selalu mendapatkan dana kelurahan untuk setiap program stunting?

Disposisi

1. Apakah kader memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan tsb ?
2. Bagaimana sikap kader dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?

Struktur Birokrasi

1. Menurut ibu bagaimanakah standar operasi dalam melaksanakan sosialisasi di kecamatan medan belawan dalam pencegahan stunting?

Identitas Informan V (Informan Tambahan)

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :

Komunikasi

1. Apakah ibu aktif berkunjung ke puskesmas atau posyandu jika adanya sosialisasi tentang stunting?
2. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
3. Apakah sosialisasi tersebut sudah berjalan optimal ?
4. Apa Saja Program yang diberikan Posyandu atau puskesmas Kepada ibu yang memiliki balita dalam upaya penerunan stunting?

Sumber Daya

1. Apakah kader mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari puskesmas dan kecamatan dalam pelaksanaan posyandu?
2. Apakah ibu pernah mendapatkan bantuan dan jaminan sosial untuk program penurunan stunting?

Disposisi

1. Bagaimana sikap pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?
2. Apakah pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya ?

Struktur Birokrasi

1. Menurut ibu bagaimanakah standar operasi dalam melaksanakan sosialisasi di kecamatan medan belawan dalam pencegahan stunting?

3. Hasil Observasi

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 18
TAHUN 2020 TENTANG KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING
(Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)**

1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati : Kantor Camat Medan Belawan Kota Medan
- b. Lokasi : Jl. Cimanuk No.03, Belawan II, Medan Kota Belawan,
- c. Hari/ Tanggal : Rabu, 24 April 2024

2. Aspek- aspek yang diamati

- a. Meninjau langsung lokasi penelitian, serta keadaan sekitar lokasi lingkungan kantor Camat Medan Belawan
- b. Mengamati kegiatan yang dilakukan pegawai dalam memberikan Sosialisasi kepada masyarakat

3. Lembar Observasi

No	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Profil Kantor Camat Medan Belawan	√		Di dapat dari medanbelawan.pemkomedan.go.id
2.	Visi misi Kantor Camat Medan Belawan	√		Visi : a.Sosial Capital b.Natural Capital c.Human-made Capital d.Economic/Finansial e.Human Capital Misi : a. Medan Berkah b.Medan Maju c.Medan Bersih d.Medan Membangun e.Medan Kondusif f.Medan Inovatif g.Medan Beridentitas
3.	Struktur Pemerintahan	√		Dokumentasi Penelitian

4.	Standar Operasional Prosedur/ Maklumat Pelayanan		√	SOP Tertulis atau diteken belum dibuat tetapi pelaksanaannya sudah
5.	Sikap Pegawai	√		1. Ramah 2. Sigap (fast respon) Indikator ini dilihat sejak peneliti melakukan penelitian sampai selesai penelitian.
6.	Sarana Dan Prasarana a. Ruang Kerja b. ruang tunggu/tempat duduk c. parkir d. perangkat computer e. AC f. Toilet g. Pengarsipan berkas	√		Sarana dan prasarana dilihat langsung oleh peneliti dan layak pakai
7.	Sikap/ respon	√		1. ramah/baik 2. masyarakat taat mengikuti prosedur sosialisasi atau arahan dari pemerintah dan ada juga masyarakat yang tidak peduli. Indikator ini dilihat dari hasil observasi beberapa informan

4. Hasil Wawancara

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN
2020 TENTANG KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI
KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN**

Identitas Informan I (Informan Kunci)

1. Nama : Yose Ferry, S.sos
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pekerjaan : Sekretaris Camat

Komunikasi

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat terkait pencegahan stunting?
2. Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak internal dengan pelaksana terkait sosialisasi tersebut?
3. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
4. Kapan sosialisasi ini mulai dilakukan ? untuk waktu pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan berapa bulan sekali ?
5. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi tersebut ?
6. Apakah sosialisasi tersebut sudah berjalan optimal ?

Sumber Daya

1. Apakah Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang stunting dan penanganannya ?
2. Apakah sarana dan prasarannya serta fasilitas sudah memadai dalam menunjang kegiatan implementasi peraturan walikota tersebut ?
3. Bagaimana untuk anggaran dalam implementasi kegiatan peraturan walikota medan no 18 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan stunting ?

Disposisi

1. Apakah pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan tsb ?
2. Bagaimana sikap pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?

Struktur Birokrasi

1. Apakah kantor camat memiliki SOP yang jelas terkait kebijakan mengenai stunting dan pencegahannya ?



Identitas Informan II (Informan Utama)

1. Nama : Irma Suri Efanti, A.Md
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Kepala Seksi Pembangunan Pemerdayaan Masyarakat

Komunikasi

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat terkait pencegahan stunting ?
2. Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak internal dengan pelaksana terkait sosialisasi tersebut?
3. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
4. Kapan sosialisasi ini mulai dilakukan ? untuk waktu pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan berapa bulan sekali ?
5. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi tersebut ?
6. Apakah sosialisasi tersebut sudah berjalan optimal ?

Sumber Daya

1. Apakah Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang stunting dan penanganannya ?
2. Apakah sarana dan prasarannya serta fasilitas sudah memadai dalam menunjang kegiatan implementasi peraturan walikota tersebut ?
3. Bagaimana untuk anggaran dalam implementasi kegiatan peraturan walikota medan no 18 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan stunting ?

Disposisi

1. Apakah pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan tsb ?
2. Bagaimana sikap pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?

Struktur Birokrasi

1. Apakah kantor camat memiliki SOP yang jelas terkait kebijakan mengenai stunting dan pencegahannya ?

Identitas Informan III (Informan Utama)

1. Nama : Sri Andriani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Tenaga Pelaksana Gizi

Komunikasi

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat terkait pencegahan stunting ?
2. Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak internal dengan pelaksana terkait sosialisasi tersebut?
3. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
4. Kapan sosialisasi ini mulai dilakukan ? untuk waktu pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan berapa bulan sekali ?
5. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi tersebut ?
6. Apakah sosialisasi tersebut sudah berjalan optimal ?

Sumber Daya

1. Apakah Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang stunting dan penanganannya ?
2. Apakah sarana dan prasarannya serta fasilitas sudah memadai dalam menunjang kegiatan implementasi peraturan walikota tersebut ?
3. Bagaimana untuk anggaran dalam implementasi kegiatan peraturan walikota medan no 18 tahun 2020 tentang konvergensi pencegahan stunting ?

Disposisi

1. Apakah pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan tsb ?
2. Bagaimana sikap pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?

Struktur Birokrasi

1. Apakah Puskesmas Medan Belawan memiliki SOP yang jelas terkait kebijakan mengenai stunting dan pencegahannya ?

Identitas Informan IV (Informan Utama)

1. Nama : Juli Harnani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Kader Posyandu

Kominikasi

1. Apakah ibu mendapatkan penyuluhan tentang pencegahan stunting dari puskesmas?
2. Apakah dengan penyuluhan tentang pencegahan stunting dapat membuat masyarakat yang memiliki balita stunting memahami pencegahan stunting, jika iya bagaimana?
3. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
4. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi tersebut ?

Sumber Daya

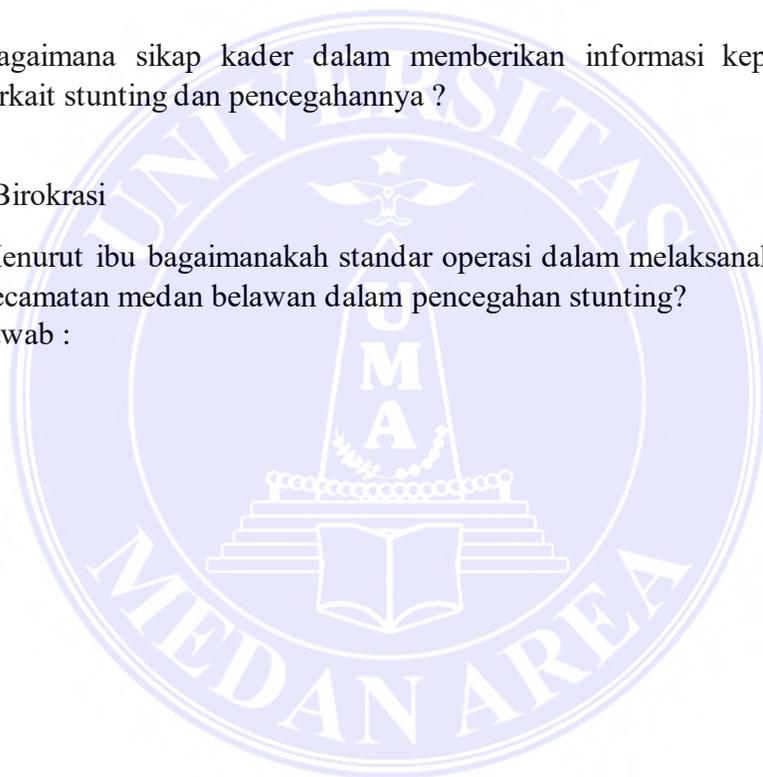
1. Apakah Kader posyandu mendapatkan sarana dan prasarana dari puskesmas dan kelurahan dalam pelaksanaan posyandu ?
2. Apakah pelaksanaan posyandu selalu mendapatkan dana kelurahan untuk setiap program stunting ?

Disposisi

1. Apakah kader memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan tsb ?
2. Bagaimana sikap kader dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?

Struktur Birokrasi

1. Menurut ibu bagaimanakah standar operasi dalam melaksanakan sosialisasi di kecamatan medan belawan dalam pencegahan stunting?
Jawab :



Identitas Informan V (Informan Tambahan)

1. Nama : Siti Fauzaih
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Komunikasi

1. Apakah ibu aktif berkunjung ke puskesmas atau posyandu jika adanya sosialisasi tentang stunting?
2. Bagaimana bentuk dan isi sosialisasi yang dilakukan ?
3. Apakah sosialisasi tersebut sudah berjalan optimal ?
4. Apa Saja Program yang diberikan Posyandu atau puskesmas Kepada ibu yang memiliki balita dalam upaya penurunan stunting?

Sumber Daya

1. Apakah kader mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari puskesmas dan kecamatan dalam pelaksanaan posyandu?
2. Apakah ibu pernah mendapatkan bantuan dan jaminan sosial untuk program penurunan stunting?

Disposisi

1. Bagaimana sikap pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan pencegahannya ?
2. Apakah pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya ?

Struktur Birokrasi

1. Menurut ibu bagaimanakah standar operasi dalam melaksanakan sosialisasi di kecamatan medan belawan dalam pencegahan stunting?

5. Dokumentasi Penelitian

Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan



Sarana dan Prasarana





Foto Wawancara Bersama Bapak Sekretaris Camat Medan Belawan Sebagai
Informan Kunci dengan Bapak Yose Ferry, S.Sos

Pada Senin, 29 April 2024



Wawancara Bersama Kasi Pembangunan Pemerdayaan Masyarakat Kecamatan
Medan Belawan sebagai Informan Utama dengan Ibu Irna Suri Efanti, AM.d

Pada Rabu, 24 April 2024



Foto Wawancara Bersama Ibu Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Medan Belawan
Sebagai Informan Utama dengan Ibu Sri Andriani
Pada Kamis, 16 Mei 2024



Foto Wawancara Bersama Ibu Kader Posyandu Kecamatan Medan Belawan Sebagai
Informan Utama Dengan Ibu Juli Harnani
Pada Selasa, 25 Juni 2024



6. Surat Riset Lapangan

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 692/FIS.0/01.10/III/2024 Medan, 06 Maret 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Camat Medan Belawan Kota Medan
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya mencria mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Rinaldy
NIM : 208520029
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Camat Medan Belawan untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“Implementasi peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Wahid Musthafa S., S.Sos, M.IP

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439, Faksimile (061) 7873144

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000/0613

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 692/FIS.0/01.10/III/2024 Tanggal 06 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.
NAMA	: Muhammad Rinaldy
NIM	: 208520029
PROGRAM STUDI	: Administrasi Publik
LOKASI	: Kecamatan Medan Belawan Kota Medan
JUDUL	: "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)"
LAMANYA	: 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada Pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak Dibenarkan Melakukan Riset atau Aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (bridamedan@gmail.com).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan Ketentuan atau Peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Medan**
Pada Tanggal : **22 Maret 2024**



U tandatangan secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,
Mansuryah, S. Sos. M. AP
Pembina IK, (PMB)
NIP 196805081982004031

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Camat Medan Belawan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BRIC
- UU 11/2002 No. 11 Tahun 2002 (Rita, 3 April) - *
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BRIC
- UU 11/2002 No. 11 Tahun 2002 (Rita, 3 April) - *



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN BELAWAN
Jalan Cimanuk Nomor 3, Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara 20412,
Laman medanbelawan.pemkomedan.go.id, Pos-el medanbelawan@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 000.9/0616

Menindak lanjuti Surat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor :
000/0613 Tanggal 22 Maret 2024 Perihal Surat Keterangan Riset.

Camat Medan Belawan dengan ini memberikan Surat Izin untuk melakukan Riset
Kepada :

Nama : Muhammad Rinaldy
NIM : 208520029
Jurusan : Administrasi Publik
Lokasi : Kecamatan Medan Belawan
Judul : Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18
Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting
(Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)
Lamanya : 03 (Tiga) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Maka dengan ini pada prinsipnya tidak berkeberatan/menerima Permohonan izin
Mengadakan Riset di Kecamatan Medan Belawan serta mematuhi peraturan dan
ketentuan yang berlaku dilokasi tempat Riset dan tidak dibenarkan melakukan Riset
atau aktivitas lain diluar lokasi yang telah diizinkan dan diwajibkan melaporkan Hasil
Riset Kepada Camat Medan Belawan selambat-lambatnya 01 (satu) bulan setelah Riset.

Demikian Surat Izin Riset ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Medan, 23 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Camat Medan Belawan
Yoga Budi Pratama Irawan, SSTP, M.Si
Pembina (M/W)
NIP 198504192004121001



Dokumen ini telah diarsipkan oleh sistem informasi manajemen Universitas Medan Area pada tanggal 21/10/24
1014195 No. 11 Tahun 2015, No. 3, 2016, 1. Yohanes Pribadi, Sekretaris Jenderal Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/10/24

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
DINAS KESEHATAN
Jalan Rotan Komplek Petisah Nomor 1, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, Medan 20112
Telepon / Faksimile (061) 4520331
Laman dinkes.pemkomedan.go.id, Pos-el dinkes@pemkomedan.go.id

Nomor : 440/162.15/VI/2024
Lampiran :
Hal : Izin Pengambilan Data Riset

Medan, 16 Mei 2024

Yth :
**Kepala UPT Puskesmas
Belawan**
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 1104/FIS.2/01.10/VI/2024, tanggal 02 Mei 2024, hal Permohonan Izin Pengambilan Data di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan, kepada:

Nama : Muhammad Rinaldy
NIM : 208520029
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami:

1. Dapat menyetujui kegiatan Penelitian/ Riset yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Tempat Penelitian/ Riset membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian/ Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.

Demikian kami sampaikan agar dapat dimaklumi, atas kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Kesehatan
Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan


Rukun Bamadani Br Karo, SKM, M.K.M
Pembina (IV/a)
NIP 19830706 201101 2 010